



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018-2021**

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Disusun Oleh :

**MARIA OCTAVIA USITAKE WOKAL**

**1804431011**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN TERAPAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**JULI 2023**

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018-2021**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan  
Akuntansi Keuangan pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan  
Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Disusun Oleh :

**MARIA OCTAVIA USITAKE WOKAL**

**1804431011**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN TERAPAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**JULI 2023**



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Maria Octavia Usitake Wokal

NIM : 1804431011

Tanda Tangan :



Tanggal : 20 Juli 2023

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Maria Octavia Usitake Wokal

NIM : 1804431011

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018-2021

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Utami Puji Lestari, S.E., Ak., M.Ak., Ph.D.

Anggota Penguji : Taufikul Ichsan, S.E., Ak., M.M.

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Juli 2023

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP.196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Maria Octavia Usitake Wokal  
Nomor Induk Mahasiswa : 1804431011  
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / D4 Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018-2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Taufikul Ichsan, S.E., Ak., M.M.

NIP. 195907221989031002

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Ketua Prgram Studi

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CTA, CPIA.

NIP. 196302031990031001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018-2021” tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. sc. H., Zainal Nur Arifin Dipl-Ing. HTL.,M.T selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Taufikul Ichsan, S.E., Ak., M. M. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah membantu dan memberikan ilmu kepada penulis selama menjalankan perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
6. Bapak Aloysius Wokal dan Ibu Paulina Blolong selaku orang tua serta Fr.Ito Wokal, Cp selaku kakak saya yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis.
7. Teman-teman AKT 8A yang telah memberikan dukungan serta semangat selama menempuh perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
8. Diri saya sendiri yang telah bertahan hingga saat ini dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, doa, serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penulis dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga diharapkan dapat berguna bagi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca.

Depok, 20 Juli 2023

Maria Octavia Usitake Wokal





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Octavia Usitake Wokal  
NIM : 1804431011  
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018-2021”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media atau mengformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Tanggal : 20 Juli 2023

Yang menyatakan

Maria Octavia Usitake Wokal



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018-2021

Oleh :

Maria Octavia Usitake Wokal  
Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menginterpretasikan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2018-2021 yang dinilai berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021 berdasarkan rasio kemandirian memiliki kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif, rasio efektivitas memiliki kategori cukup efektif, rasio efisiensi memiliki kategori tidak efisien, rasio pertumbuhan mengalami kenaikan dalam dua tahun dan mengalami penurunan dalam satu tahun, rasio derajat desentralisasi memiliki kategori sedang. Secara umum, kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai kurang baik dalam mengelola APBD-nya.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan, Derajat Desentralisasi.



## ASSESSMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE GOVERNMENT OF EAST NUSA TENGGARA FOR FISCAL YEAR 2018-2021

By:

Maria Octavia Usitake Wokal

D4 Financial Accounting Study Program

### ABSTRACT

*This study aims to measure and interpret the financial performance of the East Nusa Tenggara Provincial government for the 2018-2021 fiscal year which is assessed based on the ratio of independence, effectiveness, efficiency, growth, and degree of decentralization. The type of research used is quantitative research with a descriptive approach and uses documentation techniques to collect data. The data used in this study is secondary data in the form of a report on the realization of the East Nusa Tenggara Provincial government's budget for 2018-2021. The results of this study indicate that the financial performance of the government of East Nusa Tenggara Province in 2018-2021 based on the independence ratio has a low category with a consultative relationship pattern, the effectiveness ratio has the moderately effective category, the efficiency ratio has the inefficient category, the growth ratio has increased in two year and decreased in one year, the ratio of the degree of decentralization is in the moderate category. In general, the financial performance of the East Nusa Tenggara provincial government is considered to be poor in managing its regional budget.*

*Keywords : Regional Financial Performance, Independence, Effectiveness, Efficiency, Growth, Degree of Decentralization.*

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....   | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN.....  | iii  |
| LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI.....  | iv   |
| KATA PENGANTAR.....   | v    |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK<br>KEPENTINGAN AKADEMIS ..... | vii  |
| ABSTRAK.....  | viii |
| ABSTRACT.....   | ix   |
| DAFTAR ISI.....   | x    |
| DAFTAR TABEL.....   | xii  |
| DAFTAR GAMBAR.....  | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....  | 5    |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian.....  | 6    |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....  | 6    |
| 1.5 Manfaat Penelitian.....   | 6    |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....  | 6    |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | 8    |
| 2.1 Pemerintah Daerah.....  | 8    |
| 2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....                                       | 8    |
| 2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....                                   | 8    |
| 2.4 Keuangan Daerah.....  | 9    |
| 2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....                                       | 9    |
| 2.6 Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....                             | 10   |
| 2.7 Penelitian Terdahulu.....   | 13   |
| 2.8 Kerangka Pemikiran.....   | 17   |
| <b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....  | 18   |
| 3.1 Jenis Penelitian.....   | 18   |
| 3.2 Objek Penelitian.....   | 18   |
| 3.3 Populasi dan Sampel.....  | 18   |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....   | 19   |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data.....  | 19   |
| 3.6 Metode Analisis Data.....   | 20   |
| <b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....                                | 21   |
| 4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian.....  | 21   |
| 4.2 Analisis Data.....  | 22   |
| 4.2.1 Penilaian Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio<br>Kemandirian.....     | 22   |
| 4.2.2 Penilaian Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio<br>Efektivitas.....     | 25   |
| 4.2.3 Penilaian Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio<br>Efisiensi.....       | 28   |

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

|                       |  |    |
|-----------------------|--|----|
| 4.2.4                 | Penilaian Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio Pertumbuhan .....            | 32 |
| 4.2.5                 | Penilaian Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi ..... | 34 |
| <b>BAB 5</b>          | <b>PENUTUP</b> .....   | 38 |
| 5.1                   | Kesimpulan .....   | 38 |
| 5.2                   | Saran.....   | 40 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> | .....  | 42 |
| <b>LAMPIRAN</b>       | .....  | 46 |





## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi PAD Provinsi NTT Tahun 2018-2021 .....                                      | 2  |
| Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2018-2021 ..                                     | 3  |
| Tabel 2.1 Kemampuan Daerah, Tingkat Kemandirian, dan Pola Hubungan ...                                       | 10 |
| Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Efektivitas .....   | 11 |
| Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Efisiensi .....   | 12 |
| Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi .....  | 13 |
| Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu .....   | 13 |
| Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2021 .....           | 23 |
| Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2021 .....           | 26 |
| Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2021 .....             | 29 |
| Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2021 .....           | 33 |
| Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 -2021 ..... | 35 |

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..... 17





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR LAMPIRAN**

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018..... | 46 |
| Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019..... | 47 |
| Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020..... | 47 |
| Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021..... | 47 |





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah sebagai suatu organisasi memiliki wewenang untuk menyusun serta melaksanakan peraturan perundang-undangan di suatu wilayah tertentu, memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Pemerintah akan melakukan berbagai cara agar semua masyarakat di wilayahnya hidup sejahtera. Namun dengan wilayah Indonesia yang sangat luas ini, pemerintah pusat tidak dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Oleh karena itu pemerintah pusat terbagi menjadi pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan di masyarakat. Terjadinya transfer kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah ini, melahirkan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian dilakukan perbaikan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan dari pemerintah pusat tidak hanya mengatur mengenai bagaimana melayani masyarakatnya. Namun, juga mengenai bagaimana upaya untuk mencukupi kebutuhan daerahnya di bagian keuangan (Soraida, 2022).

Adanya otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah, agar dapat meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah serta mengecilkan ketergantungan terhadap pihak luar (Fadhilah, A. N, Tohari, A., dan Zaman, B., 2022). Otonomi daerah membantu pemerintah daerah agar dapat melihat segala permasalahan dan keperluan di wilayahnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh.

Pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan tiap daerah menyiapkan beberapa aspek pendukungnya. Di antaranya sumber daya manusia, sumber daya keuangan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dan sarana prasarana. Dalam rangka pelaksanaannya, suatu daerah dikatakan mampu jika dapat menggali berbagai sumber pendapatan agar meminimalisir ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang ditetapkan dapat disesuaikan dengan kesanggupan dan potensi daerah tersebut. Kinerja terhadap APBD perlu diukur agar dapat diketahui apakah pengelolaannya telah berjalan dengan semestinya. Selain untuk mengukur, dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan patokan untuk meningkatkan kinerja keuangan di tahun berikutnya (Zuhri & Soleh, 2016).

Penyerapan APBD menjadi topik yang selalu dibahas ketika mendekati akhir tahun anggaran, dikarenakan tingkat penyerapan anggaran daerah yang masih rendah. Hal ini terlihat saat Kemenkeu bersama Kemendagri membahas mengenai realisasi APBD 2021 yang rendah serta melakukan evaluasi dan upaya untuk mendorong percepatan realisasi APBD. Upaya yang dilakukan ialah dengan mengirimkan tim gabungan ke daerah-daerah yang serapan anggarannya masih rendah (Watra, 2021). Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah yang penyerapan APBD-nya masih rendah bahkan ketika sudah memasuki bulan desember, penyerapan APBD belum mencapai target (Rambu, 2021). Oleh karena itu, Kemendagri menurunkan tim gabungan yang terdiri dari pejabat dan staf Direktorat Jenderal (Ditjen), Bina Keuangan Daerah (Keuda), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nurrahman, 2022).

Rendahnya realisasi APBD ini terjadi baik dari segi pendapatan dan belanja. Kondisi ini bisa dilihat pada tabel realisasi pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berikut ini :

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi PAD Provinsi NTT Tahun 2018-2021

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |                      | Presentase |
|-------|------------------------------|----------------------|------------|
|       | Anggaran                     | Realisasi            |            |
| 2018  | 1.090.450.085.602,00         | 1.095.269.978.577,22 | 100,44 %   |
| 2019  | 1.345.841.709.148,00         | 1.258.958.953.288,30 | 93,54 %    |
| 2020  | 1.465.773.875,091,00         | 1.166.570.596,936,49 | 79,59 %    |



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

|      |                      |                      |         |
|------|----------------------|----------------------|---------|
| 2021 | 1.672.063.318.672,00 | 1.238.032.648.888,51 | 74,04 % |
|------|----------------------|----------------------|---------|

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi NTT Tahun 2018-2021 (data diolah)

Pada tabel di atas, realisasi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 PAD terealisasi melebihi target yaitu sebesar 100,44 %. Lalu tahun 2019 PAD yang terealisasi menurun menjadi 93,54%. Selanjutnya tahun 2020 kembali terjadi penurunan yang drastis yaitu menjadi 79,59%. Lalu pada tahun 2021 PAD yang terealisasi juga menurun menjadi 74,04%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal menggali potensi-potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah. Sehingga menyebabkan pemerintah daerah masih sangat membutuhkan bantuan dari pihak luar. Terlihat dari total pendapatan transfer Provinsi Nusa Tenggara Timur dari pemerintah pusat lebih tinggi daripada pendapatan asli daerah.

Realisasi PAD yang rendah disebabkan karena menurunnya penerimaan dari pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah akibat dampak dari pandemi *Covid-19* (CNNNews, 2021). Pendapatan pajak mengalami penurunan akibat masih banyak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini disampaikan oleh Alex Lumba sebagai Kepala Badan Aset dan Pendapatan Nusa Tenggara Timur (Jehola, 2021).

Selain dari segi realisasi pendapatan daerah yang rendah, realisasi belanja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga terbelang rendah dari tahun 2018-2021. Hal ini bisa terlihat pada tabel realisasi belanja Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021 di bawah ini :

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2018-2021

| Tahun | Belanja Daerah       |                      | Presentase |
|-------|----------------------|----------------------|------------|
|       | Anggaran             | Realisasi            |            |
| 2018  | 4.701.140.309.467,00 | 4.415.586.584.477,67 | 93,93 %    |
| 2019  | 5.222.406.123.824,55 | 4.758.379.563.095,30 | 91,11 %    |
| 2020  | 5.821.414.084.033,00 | 5.290.121.844.382,14 | 90,87 %    |
| 2021  | 6.880.672.335.906,00 | 5.508.767.906.132,69 | 80,06 %    |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi NTT Tahun 2018-2021 (data diolah)

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat realisasi anggaran belanja Provinsi Nusa Tenggara Timur menurun dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 realisasi belanja sebesar 93,93%. Lalu pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 91,11%. Tahun 2020 juga menurun menjadi 90,87%. Kemudian pada tahun 2021 realisasi belanja menjadi 80,06% yang berarti telah terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Namun apabila dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158, kinerja penganggaran dikatakan baik jika mempunyai persentase penyerapan anggaran minimal 95%. Maka dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran pada Provinsi Nusa Tenggara Timur belum dapat dimanfaatkan secara maksimal atau masih rendah.

Tingkat serapan yang rendah pada anggaran belanja Provinsi Nusa Tenggara Timur berasal dari belanja barang dan jasa yang menurun sebagai akibat banyaknya pengadaan barang dan jasa yang terhambat kendala administrasi sebagai dampak dari *refocusing* APBD (Kabar NTT, 2021). Selain itu juga dikarenakan banyaknya proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang tertunda, karena pandemi *Covid-19* (Bank Indonesia, 2021a).

Serapan APBD yang rendah ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak tercapainya target realisasi anggaran menyebabkan berkurangnya kegunaan belanja, banyaknya dana yang menganggur karena tidak digunakan dengan maksimal. Kondisi ini berdampak secara langsung kepada masyarakat, sebab tidak terlaksananya program yang sudah direncanakan. Diantaranya program pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan lainnya. Dampak lainnya adalah dapat mengurangi jumlah lapangan kerja sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah banyak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, pemerintah daerah berperan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahannya dengan berlandaskan pada asas otonomi, dan berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan ini merupakan suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut Halim (2014) cara untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah menggunakan analisis rasio. Rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan rasio derajat desentralisasi. Hasil analisis tersebut kemudian dipakai untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan PAD, tingkat kemandirian keuangan untuk menjalankan otonomi daerah, seberapa besar kontribusi PAD terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, serta meninjau pertumbuhan penerimaan pendapatan dan pengeluaran dalam suatu periode.

Penelitian terdahulu oleh Marliani (2022) mengenai Analisis Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020, menjelaskan bahwa rasio kemandirian keuangan daerahnya berkategori rendah dan berpola konsultatif. Rasio derajat desentralisasi berkriteria kurang, rasio efektivitas PAD sangat efektif, rasio efisiensi belanja dengan kriteria efisien. Sedangkan penelitian Yulinchton, Ariani, dan Triwahyuningtyas (2022) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019, menjelaskan bahwa rasio kemandirian berpola instruktif. Rasio efektivitas berkriteria tidak efektif, rasio pertumbuhan berpola fluktuatif, rasio keserasian dengan kondisi tidak seimbang, serta rasio desentralisasi fiskal dengan kriteria rendah.

Penelitian-penelitian tersebut menggunakan sampel yang berbeda dan hasilnya juga tidak tetap, sehingga penilaian kinerja pemerintah daerah perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk menilai kinerja keuangan dengan judul **“Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018-2021”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang rendah. Rendahnya realisasi pendapatan disebabkan oleh pendapatan dari pajak dan retribusi yang menurun akibat pandemi *Covid-19*, serta lemahnya pengelolaan aset. Sedangkan rendahnya realisasi belanja disebabkan oleh pengadaan barang dan jasa yang terhambat dan banyak proyek infrastruktur yang tertunda. Dampak dari rendahnya serapan APBD ini mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebab banyak program tidak terealisasi.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya yaitu :

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021 apabila dinilai menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi?
2. Bagaimana hasil penilaian pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021 yang dinilai menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi.
2. Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021.

### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis  
 Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik terkhususnya untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah, dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis  
 Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan bahan evaluasi untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pemerintahan lainnya, dan menjadi tolak ukur dalam pembuatan kebijakan di periode selanjutnya.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi lima bab di antaranya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup, yang dijelaskan di bawah ini :



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang untuk menerangkan alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari teori-teori dasar yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

### BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Memuat jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

### BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang gambaran umum dan analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### BAB 5 : PENUTUP

Terbagi menjadi dua yaitu kesimpulan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan serta saran bagi penelitian selanjutnya.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan disampaikan di atas, maka ditarik kesimpulannya adalah :

1. Penilaian kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode anggaran 2018-2021 bertujuan untuk mengukur serta menginterpretasikan hasil yang diraih selama tahun tersebut. Hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2018-2021 berdasarkan rasio kemandirian memiliki rata-rata 28,91% dan berkategori rendah, serta mempunyai pola hubungan konsultatif. Rendahnya rasio kemandirian ini dikarenakan tingginya pendapatan transfer dari pemerintah pusat yaitu dana bagi hasil pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik serta adanya penyaluran dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain dari pendapatan transfer, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan pinjaman ke PT Bank NTT dan PT SMI. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya memiliki sedikit kemampuan untuk menjalankan otonomi daerahnya, dan masih membutuhkan bantuan dari pihak luar.
  - b. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2018-2021 berdasarkan rasio efektivitas memiliki rata-rata 86,90% yang berkategori cukup efektif. Ini dikarenakan penerimaan PAD berupa pajak daerah dan retribusi tidak terealisasi sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan. Penyebabnya adalah penjualan kendaraan bermotor menjadi lesu, masih banyak yang belum membayar pajak terutama PKB, serta menurunnya pendapatan retribusi dari pasar, tempat-tempat wisata dan berbagai jenis perizinan sebagai akibat dari pandemi *Covid-19*. Ini berarti secara umum pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup efektif dalam merealisasikan PAD.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2018-2021 berdasarkan rasio efisiensi memiliki rata-rata 102,45% yang berkategori tidak efisien. Ini dikarenakan tingginya belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur beberapa bendungan, tingginya belanja pegawai sebagai akibat meningkatnya UMP, serta belanja hibah yang turut meningkat seiring meningkatnya penerima PKH. Selain itu, belanja tak terduga juga meningkat yang dialokasikan untuk Jaminan Pengaman Sosial (JPS) serta untuk pembenahan ekonomi sebagai efek pandemi *Covid-19*. Tingginya rasio efisiensi menunjukkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum maksimal untuk menggali sumber pendapatan, dan dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan. Hal ini terlihat dari jumlah belanja yang dibelanjakan lebih tinggi dibanding pendapatan yang diperoleh.
- d. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2018-2021 berdasarkan rasio pertumbuhan memiliki rata-rata 3,23%. Rasio ini memiliki tren yang fluktuatif, dengan rasio tertinggi berada pada tahun 2019. Tingginya rasio pertumbuhan disebabkan oleh meningkatnya penerimaan PAD dari PKB, BBNKB, PBBKB, pajak rokok, serta retribusi daerah khususnya sektor pariwisata. Rasio pertumbuhan cenderung bersifat positif selama tiga tahun dan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan perekonomian sedang lemah karena pandemi *Covid-19*, dan akhirnya mengakibatkan rendahnya penerimaan pendapatan baik dari pajak daerah maupun dari retribusi daerah.
- e. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2018-2021 berdasarkan rasio derajat desentralisasi memiliki rata-rata 22,81% dan berkategori sedang. Ini dikarenakan selama tahun tersebut terjadi kenaikan dan penurunan dalam penerimaan PAD. Penurunan PAD bersumber dari retribusi dinas pertanian dan ketahanan pangan, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, serta rendahnya penerimaan dari BLUD SPAM Kupang. Sedangkan kenaikan PAD bersumber dari penerimaan PKB, retribusi, serta pendapatan dari BLUD

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

RSUD Dr.W.Z.Johannes Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai memiliki kemampuan cukup dalam menyelenggarakan desentralisasi.

2. Secara umum apabila dilihat dari rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai kurang baik dalam mengelola APBD-nya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan di atas, saran pada penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - a. Berdasarkan rasio kemandirian, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu untuk mengurangi ketergantungan kepada dana transfer dari pihak luar, dengan cara meningkatkan PAD berupa pajak dan retribusi daerah. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai, melakukan penagihan atas tunggakan-tunggakan pajak kendaraan bermotor, serta mendorong SKPD untuk mengoptimalkan potensi pungutan retribusi dan pemanfaatan aset daerah.
  - b. Berdasarkan rasio efektivitas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu untuk meningkatkan realisasi PAD terutama pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang rata-rata belum mencapai target yang ditentukan. Dapat dilakukan dengan meningkatkan penyertaan modal dengan BUMD dan perusahaan swasta guna mendapatkan bagian laba dan dividen.
  - c. Berdasarkan rasio efisiensi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu untuk memanfaatkan dana belanjanya dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Selain itu, pemerintah sebaiknya merancang strategi dengan baik dan tepat untuk penggunaan anggaran belanjanya dengan memprioritaskan belanja yang sangat dibutuhkan

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sehingga tidak terjadi pemborosan dana dan tepat sasaran untuk memicu aktivitas ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- d. Berdasarkan rasio pertumbuhan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan di periode selanjutnya dengan lebih menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial terutama pada sektor pariwisatanya. Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan), ketersediaan restoran dan rumah makan, tempat souvenir dan belanja, serta meningkatkan fasilitas transportasi sebab akses ke beberapa objek wisata masih sulit. Peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan sehingga dapat memaksimalkan kepuasan wisatawan agar dapat memberi kesan positif kepada calon wisatawan lainnya.
  - e. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu untuk meningkatkan pendapatan daerahnya di antaranya adalah pendapatan pajak dari PKB, BBNKB, PBBKB, pajak rokok, dan pajak air. Retribusi daerah dari retribusi jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari penyertaan modal kepada BUMD dan perusahaan swasta. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan seperti jasa giro, bunga, denda atas keterlambatan dilakukannya kegiatan, serta pendapatan pengembalian dari BLUD.
2. Bagi penelitian selanjutnya yang juga menggunakan topik penelitian penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, diharapkan untuk menambahkan sumber penelitian berupa data primer yang dilakukan menggunakan teknik wawancara, agar dapat memperoleh informasi-informasi secara langsung dari pihak yang terkait, sehingga hasil penelitiannya lebih akurat. Selain itu juga dapat menggunakan lebih banyak rasio sebagai alat pengukuran kinerja keuangan, seperti rasio pertumbuhan belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal serta menambahkan analisis non-keuangan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengelola APBD.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metode penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja pressindo.
- Bank Indonesia. (2018). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi NTT* (Issue November).
- Bank Indonesia. (2019). Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur Agustus 2019. In *Agustus 2019*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur November 2020*.
- Bank Indonesia. (2021a). *Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur Februari 2021*. 28 Februari 2021. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Nusa-Tenggara-Timur-Februari-2021.aspx>
- Bank Indonesia. (2021b). *Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur Mei 2021*.
- Bank Indonesia. (2021c). *Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur November 2021*.
- BPBD. (2022). *Letak Geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur*. 2022. <https://bpbd.nttprov.go.id/>
- CALK NTT. (2018). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018*.
- CALK NTT. (2019). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019*.
- CALK NTT. (2020). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020*.
- CALK NTT. (2021). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021*.
- Citra-News.Com. (2019). *Dari Kejadian Sampai Keluaran PT FLOBAMOR Terus MERUGI*. April 26, 2019. <https://citra-news.com/2019/04/26/dari-kejadian-sampai-keluaran-pt-flobamor-terus-merugi/>
- CNNNews. (2021). *PAD NTT 2021 Anjlok, Realisasi Per Agustus Hanya Sekitar 25%*. Selasa, 7 September 2021. <https://www.cnnews.id/pad-ntt-2021-anjlok-realisasi-per-agustus-hanya-sekitar-25/>
- Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Fadhilah, A. N., TOHARI, A., & ZAMAN, B. (2022). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2018-2021*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- JDPB NTT. (2019). Kajian Fiskal Regional. In 2019.
- Jehola, K. (2021). *Realisasi PKB Masih Rendah, Pemprov NTT Kebut Sisa Waktu*. Selasa, 16 November 2021. <https://kupang.tribunnews.com/2021/11/16/realisasi-pkb-masih-rendah-pemprov-ntt-kebut-sisa-waktu>
- Kabar NTT. (2021). *Realisasi APBD NTT Rendah Terkendala Refokusing*. 11 Juni 2021. <https://kabarntt.co/2021/realisasi-apbd-ntt-rendah-terkendala-refokusing/>
- Kaha, K. (2019). *Kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo selama 2019 mencapai 184.206 orang*. <https://kupang.antaranews.com/berita/27443/kunjungan-wisatawan-ke-labuan-bajo-selama-2019-mencapai-184206-orang>
- Keda, O. (2020). *Pemprov NTT Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Covid-19*. 11 Mei 2020. <https://www.liputan6.com/regional/read/4249247/pemprov-ntt-bebaskan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-selama-masa-covid-19>
- Keintjem, V. A., & Murni, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017-2019. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 953–962.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20.
- Mulyaningsih, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis rasio keuangan untuk

mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 6(3), 612–622.

Nurrahman, A. (2022). *Kemendagri Harap NTT Perbesar Serapan APBD Kemendagri kirim tim gabungan untuk atasi masalah serapan APBD di Provinsi NTT yang masih minim*. 24 Agustus 2022. <https://www.validnews.id/nasional/kemendagri-harap-ntt-perbesar-serapan-apbd>

Prima, E. (2021). *Pemkab Kupang sebut kerugian akibat badai seroja capai Rp1,3 triliun*. 28 April 2021. <https://tekno.tempo.co/read/1457116/pemkab-kupang-kerugian-akibat-siklon-tropis-seroja-capai-rp-13-triliun>

Purwanto, A. (2021). *Profil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-nusa-tenggara-timur>

Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum Dan Saat Pandemi COVID-19. *Among Makarti*, 15(1).

Rahayu, R. P. (2017). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Makro Manajemen*, 1(1), 55–73.

Rambu, B. (2021). *Masuk Bulan Desember, Penyerapan APBD NTT belum Mencapai Target*. Rabu, 1 Desember 2021. <https://www.victorynews.id/nasional/pr-3312289401/masuk-bulan-desember-penyerapan-apbd-ntt-belum-mencapai-target?page=1>

Sorida, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum dan Selama Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 78–82.

Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen*

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Dan Bisnis*, 7(1).

Watra, B. L. (2021). *Mendorong percepatan realisasi belanja APBD di akhir 2021*. Selasa, 14 Desember 2021.

<https://www.antaraneews.com/berita/2585053/mendorong-percepatan-realisisi-belanja-apbd-di-akhir-2021>

Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303-314.

Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).



POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(AUDITED)**  
**KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2018**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian   | Jumlah Anggaran             | Realisasi                   | Berlebih/ (Berkurang)       | %             |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                           | 4                           | 5                           | 6             |
| <b>1.</b>     | <b>PENDAPATAN - LRA</b>  | <b>4.910.289.134.602,00</b> | <b>4.781.089.962.593,22</b> | <b>(129.199.172.008,78)</b> | <b>97,37</b>  |
| <b>1.1.</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>                          | <b>1.090.450.085.602,00</b> | <b>1.095.269.978.577,22</b> | <b>4.819.892.975,22</b>     | <b>100,44</b> |
| 1.1.1.        | Pendapatan Pajak Daerah - LRA                                      | 827.886.747.000,00          | 866.157.779.773,00          | 38.271.032.773,00           | 104,62        |
| 1.1.2.        | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA                                  | 27.485.019.000,00           | 27.570.244.733,00           | 75.225.733,00               | 100,27        |
| 1.1.3.        | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 73.465.455.000,00           | 72.415.455.930,00           | (1.049.999.070,00)          | 98,57         |
| 1.1.4.        | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA                                       | 161.602.864.602,00          | 129.126.498.141,22          | (32.476.366.460,78)         | 79,90         |
| <b>1.2.</b>   | <b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>                                   | <b>3.799.175.920.000,00</b> | <b>3.680.327.636.180,00</b> | <b>(118.848.283.820,00)</b> | <b>96,87</b>  |
| 1.2.1.        | Transferke Transfer Pemerintah                                     | 3.296.226.000.000,00        | 3.296.226.000.000,00        | 0,00                        | 99,93         |
| <b>2.1.</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>   | <b>4.126.462.364.694,00</b> | <b>3.885.700.364.570,67</b> | <b>(240.762.000.123,33)</b> | <b>94,17</b>  |
| 2.1.1.        | Belanja Pegawai  | 1.328.954.311.890,00        | 1.299.772.084.613,00        | (29.182.227.277,00)         | 97,80         |
| 2.1.2.        | Belanja Barang dan Jasa  | 1.037.336.943.434,00        | 953.324.710.207,67          | (84.012.233.226,33)         | 91,90         |
| 2.1.5.        | Belanja Hibah  | 1.738.597.573.910,00        | 1.611.082.006.586,00        | (127.515.567.324,00)        | 92,67         |
| 2.1.6.        | Belanja Bantuan Sosial   | 21.574.535.500,00           | 21.521.563.164,00           | (52.972.336,00)             | 99,75         |
| <b>2.2.</b>   | <b>BELANJA MODAL</b>   | <b>571.024.432.008,00</b>   | <b>529.761.034.603,00</b>   | <b>(41.263.397.405,00)</b>  | <b>92,77</b>  |
| 2.2.1.        | Belanja Modal Tanah  | 1.171.050.000,00            | 852.255.000,00              | (318.795.000,00)            | 72,78         |
| 2.2.2.        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                  | 69.129.031.136,00           | 58.493.090.879,00           | (10.635.940.257,00)         | 84,61         |
| 2.2.3.        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                  | 228.506.161.772,00          | 213.802.530.521,00          | (14.703.631.251,00)         | 93,57         |
| 2.2.4.        | Belanja Modal Jalan, Infrast dan Jembatan                          | 267.396.021.700,00          | 252.448.197.953,00          | (14.947.823.747,00)         | 94,41         |
| 2.2.5.        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                   | 4.822.167.400,00            | 4.164.960.230,00            | (657.207.170,00)            | 86,37         |
| <b>2.3.</b>   | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>   | <b>3.652.512.765,00</b>     | <b>125.185.304,00</b>       | <b>(3.527.327.461,00)</b>   | <b>3,43</b>   |
| 2.3.1.        | Belanja Tak Terduga  | 3.652.512.765,00            | 125.185.304,00              | (3.527.327.461,00)          | 3,43          |
| <b>3.</b>     | <b>TRANSFER</b>  | <b>489.481.889.300,00</b>   | <b>431.252.682.900,00</b>   | <b>(58.229.206.400,00)</b>  | <b>88,10</b>  |
| <b>3.1.</b>   | <b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>                              | <b>485.770.954.900,00</b>   | <b>427.541.748.500,00</b>   | <b>(58.229.206.400,00)</b>  | <b>88,01</b>  |
| 3.1.1.        | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                                   | 485.770.954.900,00          | 427.541.748.500,00          | (58.229.206.400,00)         | 88,01         |
| <b>3.2.</b>   | <b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>                                   | <b>3.710.934.400,00</b>     | <b>3.710.934.400,00</b>     | <b>-</b>                    | <b>100,00</b> |
| 3.2.1.        | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya             | 1.000.000.000,00            | 1.000.000.000,00            | -                           | 100,00        |
| 3.2.3.        | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                                  | 2.710.934.400,00            | 2.710.934.400,00            | -                           | 100,00        |
|               | <b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>  | <b>(280.333.064.165,00)</b> | <b>(65.749.304.784,45)</b>  | <b>214.583.759.380,55</b>   | <b>23,45</b>  |
| <b>4.</b>     | <b>PEMBIAYAAN</b>  | <b>280.333.064.165,00</b>   | <b>278.544.277.613,00</b>   | <b>(1.788.786.552,00)</b>   | <b>99,36</b>  |
| <b>4.1.</b>   | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                       | <b>280.333.064.165,00</b>   | <b>278.544.277.613,00</b>   | <b>(1.788.786.552,00)</b>   | <b>99,36</b>  |
| 4.1.1.        | Penggunaan SILPA   | 273.576.825.165,00          | 273.856.102.582,00          | 279.277.397,00              | 100,10        |
| 4.1.5.        | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya                  | 6.756.239.000,00            | 4.688.175.031,00            | (2.068.063.969,00)          | 69,39         |
|               | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>  | <b>280.333.064.165,00</b>   | <b>278.544.277.613,00</b>   | <b>(1.788.786.552,00)</b>   | <b>99,36</b>  |
|               | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>                      | <b>-</b>                    | <b>212.794.972.828,55</b>   | <b>212.794.972.828,55</b>   | <b>-</b>      |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Provinsi NTT tahun 2018

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(AUDITED)  
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019  
TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian   | Jumlah Anggaran             | Realisasi                   | Bertambah/ (Berkurang)      | %              |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1             | 2  | 3                           | 4                           | 5                           | 6              |
| <b>1.</b>     | <b>PENDAPATAN - LRA</b>  | <b>5.561.056.352.548,00</b> | <b>5.354.092.405.679,30</b> | <b>(206.963.946.868,70)</b> | <b>96,28</b>   |
| <b>1.1.</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>                          | <b>1.345.841.709.148,00</b> | <b>1.258.958.953.288,30</b> | <b>(86.882.755.859,70)</b>  | <b>93,54</b>   |
| 1.1.1.        | Pendapatan Pajak Daerah - LRA                                      | 955.215.837.016,00          | 908.207.117.663,00          | (47.008.719.353,00)         | 95,08          |
| 1.1.2.        | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA                                  | 69.986.994.000,00           | 60.831.986.435,00           | (9.155.007.565,00)          | 86,92          |
| 1.1.3.        | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 82.227.926.500,00           | 70.662.452.308,00           | (11.565.474.192,00)         | 85,93          |
| 1.1.4.        | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA                                       | 238.410.951.632,00          | 219.257.396.882,30          | (19.153.554.749,70)         | 91,97          |
| <b>1.2.</b>   | <b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>                                   | <b>4.174.054.978.000,00</b> | <b>4.067.952.844.498,00</b> | <b>(106.102.133.502,00)</b> | <b>97,46</b>   |
| 1.2.1.        | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Desa/Perimbangan : LRA        | 4.174.054.978.000,00        | 4.067.952.844.498,00        | (106.102.133.502,00)        | 97,46          |
| <b>1.3.</b>   | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>                  | <b>41.159.665.400,00</b>    | <b>27.180.607.893,00</b>    | <b>(13.979.057.507,00)</b>  | <b>66,04</b>   |
| 1.3.1.        | Pendapatan Hibah - LRA   | 41.159.665.400,00           | 27.180.607.893,00           | (13.979.057.507,00)         | 66,04          |
| <b>2.</b>     | <b>BELANJA</b>   | <b>5.222.406.123.824,55</b> | <b>4.758.379.563.095,30</b> | <b>(464.026.560.729,25)</b> | <b>91,11</b>   |
| <b>2.1.</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>   | <b>4.216.534.683.151,00</b> | <b>3.958.664.698.490,30</b> | <b>(257.869.984.660,70)</b> | <b>93,88</b>   |
| 2.1.1.        | Belanja Pegawai  | 1.529.240.445.790,00        | 1.442.966.171.684,54        | (86.274.274.105,46)         | 94,36          |
| 2.1.2.        | Belanja Barang dan Jasa  | 1.338.350.537.361,00        | 1.194.831.892.391,76        | (143.518.644.969,24)        | 89,28          |
| 2.1.5.        | Belanja Hibah  | 1.319.391.900.000,00        | 1.291.513.467.414,00        | (27.878.432.586,00)         | 97,89          |
| 2.1.6.        | Belanja Bantuan Sosial   | 29.551.800.000,00           | 29.353.167.000,00           | (198.633.000,00)            | 99,33          |
| <b>2.2.</b>   | <b>BELANJA MODAL</b>   | <b>993.171.440.673,55</b>   | <b>798.224.255.845,00</b>   | <b>(194.947.184.828,55)</b> | <b>80,37</b>   |
| 2.2.1.        | Belanja Modal Tanah  | 30.000.000,00               | 30.000.000,00               | -                           | 100,00         |
| 2.2.2.        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                  | 134.925.962.502,00          | 116.636.579.503,00          | (18.289.382.999,00)         | 86,44          |
| 2.2.3.        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                  | 145.135.351.565,00          | 139.208.422.686,00          | (5.926.928.879,00)          | 95,92          |
| 2.2.4.        | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                          | 566.621.688.159,55          | 472.361.496.339,00          | (94.260.191.820,55)         | 83,36          |
| 2.2.5.        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                   | 146.458.438.447,00          | 69.987.757.317,00           | (76.470.681.130,00)         | 47,79          |
| <b>2.3.</b>   | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>   | <b>12.700.000.000,00</b>    | <b>1.490.608.760,00</b>     | <b>(11.209.391.240,00)</b>  | <b>11,74</b>   |
| 2.3.1.        | Belanja Tak Terduga  | 12.700.000.000,00           | 1.490.608.760,00            | (11.209.391.240,00)         | 11,74          |
| <b>3.</b>     | <b>TRANSFER</b>  | <b>547.401.440.552,00</b>   | <b>518.685.087.892,00</b>   | <b>(28.716.352.660,00)</b>  | <b>94,75</b>   |
| <b>3.1.</b>   | <b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>                              | <b>544.690.506.152,00</b>   | <b>515.982.681.892,00</b>   | <b>(28.707.824.260,00)</b>  | <b>94,73</b>   |
| 3.1.1.        | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                                   | 544.690.506.152,00          | 515.982.681.892,00          | (28.707.824.260,00)         | 94,73          |
| <b>3.2.</b>   | <b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>                                   | <b>2.710.934.400,00</b>     | <b>2.702.406.000,00</b>     | <b>(8.528.400,00)</b>       | <b>99,69</b>   |
| 3.2.3.        | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                                  | 2.710.934.400,00            | 2.702.406.000,00            | (8.528.400,00)              | 99,69          |
|               | <b>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</b>                                  | <b>5.769.807.564.376,55</b> | <b>5.277.064.650.987,30</b> | <b>(492.742.913.389,25)</b> | <b>91,46</b>   |
|               | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>   | <b>(208.751.211.828,55)</b> | <b>77.027.754.692,00</b>    | <b>285.778.966.520,55</b>   | <b>(36,90)</b> |
| <b>4.</b>     | <b>PEMBIAYAAN</b>  | <b>208.751.211.828,55</b>   | <b>205.602.009.249,55</b>   | <b>(3.149.202.579,00)</b>   | <b>98,49</b>   |
| <b>4.1.</b>   | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                       | <b>219.551.211.828,55</b>   | <b>216.350.973.249,55</b>   | <b>(3.200.238.579,00)</b>   | <b>98,54</b>   |
| 4.1.1.        | Penggunaan SilPA   | 212.794.972.828,55          | 212.794.972.828,55          | -                           | 100,00         |
| 4.1.6.        | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya                  | 6.756.239.000,00            | 3.556.000.421,00            | (3.200.238.579,00)          | 52,63          |
| <b>4.2.</b>   | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                      | <b>10.800.000.000,00</b>    | <b>10.748.964.000,00</b>    | <b>(51.036.000,00)</b>      | <b>99,53</b>   |
| 4.2.5.        | Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya                         | 10.800.000.000,00           | 10.748.964.000,00           | (51.036.000,00)             | 99,53          |
|               | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>  | <b>208.751.211.828,55</b>   | <b>205.602.009.249,55</b>   | <b>(3.149.202.579,00)</b>   | <b>98,49</b>   |
|               | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>                      | <b>-</b>                    | <b>282.629.763.941,55</b>   | <b>282.629.763.941,55</b>   | <b>-</b>       |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Provinsi NTT tahun 2019

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020

  
**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(AUDITED)**  
**KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2020**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian   | Jumlah Anggaran             | Realisasi                   | Berlebih/ (Berkurang)       | %            |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1             | 2  | 3                           | 4                           | 5                           | 6            |
| <b>1.</b>     | <b>PENDAPATAN - LRA</b>  | <b>5.837.931.035.332,00</b> | <b>5.419.935.156.637,49</b> | <b>(418.035.878.694,51)</b> | <b>92,84</b> |
| 1.1.          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA                                 | 1.465.773.875.091,00        | 1.166.570.596.936,49        | (299.203.278.154,51)        | 79,99        |
| 1.1.1.        | Pendapatan Pajak Daerah - LRA                                      | 1.031.430.505.859,00        | 924.189.837.048,00          | (107.241.069.811,00)        | 89,60        |
| 1.1.2.        | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA                                  | 104.182.191.694,00          | 34.959.171.076,00           | (69.223.020.608,00)         | 33,56        |
| 1.1.3.        | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 141.559.000.000,00          | 65.135.467.629,92           | (76.414.532.370,08)         | 46,02        |
| 1.1.4.        | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA                                       | 188.610.776.549,00          | 142.286.121.180,57          | (46.324.655.367,43)         | 75,44        |
| 1.2.          | PENDAPATAN TRANSFER - LRA  | <b>4.372.638.762.867,00</b> | <b>4.173.362.593.723,00</b> | <b>(302.276.169.144,00)</b> | <b>97,61</b> |
| 1.2.1.        | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA        | 4.254.275.336.867,00        | 4.152.039.227.723,00        | (102.236.109.144,00)        | 97,60        |
| 1.2.2.        | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA               | 19.363.366.000,00           | 19.323.366.000,00           | (40.000.000,00)             | 99,79        |
| 1.3.          | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA                         | <b>98.538.457.564,00</b>    | <b>82.001.965.978,00</b>    | <b>(16.536.491.586,00)</b>  | <b>83,22</b> |
| 1.3.1.        | Pendapatan Hibah - LRA   | 98.538.457.564,00           | 82.001.965.978,00           | (16.536.491.586,00)         | 83,22        |
| <b>2.</b>     | <b>BELANJA</b>   | <b>5.821.414.084.033,00</b> | <b>5.290.121.484.382,14</b> | <b>(531.292.599.650,86)</b> | <b>90,87</b> |
| 2.1.          | BELANJA OPERASI  | 4.308.249.666.531,00        | 4.022.397.290.093,34        | (285.852.376.437,66)        | 93,36        |
| 2.1.1.        | Belanja Pegawai  | 1.572.840.496.872,00        | 1.444.646.968.075,00        | (128.193.528.797,00)        | 91,85        |
| 2.1.2.        | Belanja Barang dan Jasa  | 1.267.165.716.152,00        | 1.221.574.013.528,45        | (45.591.702.623,55)         | 96,40        |
| 2.1.3.        | Belanja Bunga  | 13.572.187.737,00           | 5.875.483.689,89            | (7.696.704.047,11)          | 43,29        |
| 2.1.5.        | Belanja Hibah  | 1.430.660.663.400,00        | 1.329.334.450.800,00        | (101.326.212.600,00)        | 92,92        |
| 2.1.6.        | Belanja Bantuan Sosial   | 24.810.602.370,00           | 20.956.374.000,00           | (3.854.228.370,00)          | 87,32        |
| 2.2.          | BELANJA MODAL  | <b>1.230.586.986.777,00</b> | <b>1.026.785.279.414,80</b> | <b>(203.801.706.362,20)</b> | <b>83,44</b> |
| 2.2.2.        | Belanja Modal Perabotan dan Mesin                                  | 209.530.885.897,00          | 202.160.307.477,95          | (7.370.578.419,05)          | 96,48        |
| 2.2.3.        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                  | 181.551.939.494,00          | 177.836.474.129,85          | (3.715.465.364,15)          | 97,95        |
| 2.2.4.        | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                          | 668.647.178.200,00          | 504.954.198.116,00          | (163.692.980.084,00)        | 75,52        |
| 2.2.5.        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                   | 170.856.983.186,00          | 141.824.296.691,00          | (29.032.686.495,00)         | 83,01        |
| 2.3.          | BELANJA TAK TERDUGA  | <b>282.577.430.725,00</b>   | <b>240.938.915.874,00</b>   | <b>(41.638.514.851,00)</b>  | <b>85,26</b> |
| 2.3.1.        | Belanja Tak Terduga  | 282.577.430.725,00          | 240.938.915.874,00          | (41.638.514.851,00)         | 85,26        |
| <b>3.</b>     | <b>TRANSFER</b>  | <b>524.636.925.681,00</b>   | <b>465.136.531.811,50</b>   | <b>(59.500.393.869,50)</b>  | <b>88,66</b> |
| 3.1.          | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN                                     | 519.636.925.681,00          | 460.136.531.811,50          | (59.500.393.869,50)         | 88,55        |
| 3.1.1.        | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                                   | 519.636.925.681,00          | 460.136.531.811,50          | (59.500.393.869,50)         | 88,55        |
| 3.2.          | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN  | 5.000.000.000,00            | 5.000.000.000,00            | -                           | 100,00       |
| 3.2.1.        | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya             | 5.000.000.000,00            | 5.000.000.000,00            | -                           | 100,00       |
|               | <b>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</b>                                  | <b>6.346.051.009.714,00</b> | <b>5.755.258.016.193,64</b> | <b>(590.792.993.520,36)</b> | <b>90,69</b> |
|               | <b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>  | <b>(508.099.974.192,00)</b> | <b>(335.322.859.556,15)</b> | <b>172.777.114.635,85</b>   | <b>66,00</b> |
| <b>4.</b>     | <b>PEMBIAYAAN</b>  | <b>508.099.974.192,00</b>   | <b>483.706.217.940,55</b>   | <b>(104.393.756.251,45)</b> | <b>79,45</b> |
| 4.1.          | PENERIMAAN PEMBIAYAAN  | 535.099.974.192,00          | 430.706.217.940,55          | (104.393.756.251,45)        | 80,49        |
| 4.1.1.        | Penggunaan SILPA   | 282.629.763.592,00          | 282.625.763.941,55          | (4.000.000,00)              | 100,00       |
| 4.1.4.        | Pinjaman Dalam Negeri  | 244.868.120.000,00          | 143.916.722.000,00          | (100.951.398.000,00)        | 58,77        |
| 4.1.6.        | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya                  | 7.582.090.250,00            | 4.159.731.999,00            | (3.422.358.251,00)          | 54,86        |
| 4.2.          | PENGELUARAN PEMBIAYAAN   | 27.000.000.000,00           | 27.000.000.000,00           | -                           | 100,00       |
| 4.2.2.        | Pemertoran Modal/Investasi Pemerintah Daerah                       | 27.000.000.000,00           | 27.000.000.000,00           | -                           | 100,00       |
|               | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>  | <b>508.099.974.192,00</b>   | <b>483.706.217.940,55</b>   | <b>(104.393.756.251,45)</b> | <b>79,45</b> |
|               | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>                      | <b>-</b>                    | <b>68.383.358.384,40</b>    | <b>68.383.358.384,40</b>    | <b>-</b>     |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Provinsi NTT tahun 2020

**Hak Cipta :**

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur tahun 2021



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(AUDITED)  
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

Delam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian  | JUMLAH (Rp)                 |                             | BERTAMBAH / (BERKURANG)    |              |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|               |   | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN  | REALISASI                   | (Rp)                       | (%)          |
| 1             | 2   | 3                           | 4                           | 5                          | 6            |
| <b>4.</b>     | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>5.881.616.887.272,00</b> | <b>5.312.446.872.608,51</b> | <b>(569.170.014.663)</b>   | <b>90,32</b> |
| <b>4.1.</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>1.672.063.318.672,00</b> | <b>1.238.032.648.888,51</b> | <b>(434.030.669.783)</b>   | <b>74,04</b> |
| 4.1.01.       | Pajak Daerah                                      | 1.283.442.229.906,00        | 925.862.559.388,00          | (357.579.670.518)          | 72,14        |
| 4.1.02.       | Retribusi Daerah                                  | 102.148.474.750,00          | 89.890.857.732,45           | (12.257.617.018)           | 88,42        |
| 4.1.03.       | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 64.732.172.050,00           | 64.982.172.050,00           | 250.000.000                | 100,39       |
| 4.1.04.       | Lain-lain PAD yang Sah                            | 221.740.441.966,00          | 177.297.059.718,06          | (44.443.382.248)           | 79,96        |
| <b>4.2.</b>   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>4.124.996.231.200,00</b> | <b>4.000.655.446.445,00</b> | <b>(124.340.784.755)</b>   | <b>96,99</b> |
| 4.2.01.       | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 4.124.996.231.200,00        | 4.000.655.446.445,00        | (124.340.784.755)          | 96,99        |
| <b>4.3.</b>   | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>84.557.337.400,00</b>    | <b>73.758.777.275,00</b>    | <b>(10.798.560.125)</b>    | <b>87,23</b> |
| 4.3.01.       | Pendapatan Hibah                                  | 84.557.337.400,00           | 73.758.777.275,00           | (10.798.560.125)           | 87,23        |
| <b>5.</b>     | <b>BELANJA DAERAH</b>                             | <b>6.880.672.335.906,00</b> | <b>5.508.767.906.132,69</b> | <b>(1.371.904.429.773)</b> | <b>80,06</b> |
| <b>5.1.</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>                            | <b>4.396.766.725.068,00</b> | <b>4.061.962.995.625,69</b> | <b>(334.803.729.442)</b>   | <b>92,39</b> |
| 5.1.01.       | Belanja Pegawai                                   | 1.673.718.890.537,00        | 1.608.464.234.033,00        | (65.254.656.504)           | 96,10        |
| 5.1.02.       | Belanja Barang dan Jasa                           | 1.200.860.763.343,00        | 1.078.288.386.249,19        | (122.572.377.094)          | 89,79        |
| 5.1.03.       | Belanja Bunga                                     | 30.000.000.000,00           | 17.483.698.421,50           | (12.516.301.579)           | 58,28        |
| 5.1.05.       | Belanja Hibah                                     | 1.481.888.781.188,00        | 1.347.483.386.922,00        | (134.405.394.266)          | 90,99        |
| 5.1.06.       | Belanja Bantuan Sosial                            | 10.298.290.000,00           | 10.243.290.000,00           | (55.000.000)               | 99,47        |
| <b>5.2.</b>   | <b>BELANJA MODAL</b>                              | <b>1.857.834.104.917,00</b> | <b>903.257.622.800,00</b>   | <b>(954.576.482.117)</b>   | <b>48,62</b> |
| 5.2.01.       | Belanja Modal Tanah                               | 1.015.000.000,00            | 147.952.000,00              | (867.048.000)              | 14,58        |
| 5.2.02.       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 203.364.718.272,00          | 185.901.613.833,00          | (17.463.104.439)           | 91,41        |
| 5.2.03.       | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 223.570.691.317,00          | 135.344.543.385,00          | (88.226.147.932)           | 60,54        |
| 5.2.04.       | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 1.419.865.702.340,00        | 572.412.496.697,00          | (847.453.205.643)          | 40,31        |
| 5.2.05.       | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 10.017.992.988,00           | 9.451.016.885,00            | (566.976.103)              | 94,34        |
| <b>5.3.</b>   | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                      | <b>153.507.896.803,00</b>   | <b>135.775.036.685,00</b>   | <b>(17.732.860.118)</b>    | <b>88,45</b> |
| 5.3.01.       | Belanja Tidak Terduga                             | 153.507.896.803,00          | 135.775.036.685,00          | (17.732.860.118)           | 88,45        |
| <b>5.4.</b>   | <b>BELANJA TRANSFER</b>                           | <b>472.563.609.118,00</b>   | <b>407.772.251.022,00</b>   | <b>(64.791.358.096)</b>    | <b>86,29</b> |
| 5.4.01.       | Belanja Bagi Hasil                                | 462.113.609.118,00          | 397.772.251.022,00          | (64.341.358.096)           | 86,08        |
| 5.4.02.       | Belanja Bantuan Keuangan                          | 10.450.000.000,00           | 10.000.000.000,00           | (450.000.000)              | 95,69        |
|               | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                          | <b>(999.055.448.634,00)</b> | <b>(196.321.033.524,18)</b> | <b>802.734.415.110</b>     | <b>19,66</b> |
| <b>6.</b>     | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                          | <b>999.055.448.634,00</b>   | <b>258.865.991.150,79</b>   | <b>(740.189.457.483)</b>   | <b>25,91</b> |
| <b>6.1.</b>   | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                      | <b>1.268.855.448.634,00</b> | <b>503.023.089.714,99</b>   | <b>(765.832.358.919)</b>   | <b>39,64</b> |
| 6.1.01.       | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  | 68.383.358.384,00           | 68.383.358.383,99           | 0                          | 100,00       |
| 6.1.04.       | Penerimaan Pinjaman Daerah                        | 1.192.890.000.000,00        | 431.234.385.650,00          | (761.655.614.350)          | 36,15        |
| 6.1.05.       | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah      | 7.582.090.250,00            | 3.405.345.681,00            | (4.176.744.569)            | 44,91        |
| <b>6.2.</b>   | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                     | <b>269.800.000.000,00</b>   | <b>244.157.098.564,20</b>   | <b>(25.642.901.436)</b>    | <b>90,50</b> |
| 6.2.02.       | Penyertaan Modal Daerah                           | 127.300.000.000,00          | 127.300.000.000,00          | 0                          | 100,00       |
| 6.2.03.       | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo   | 140.000.000.000,00          | 114.357.098.564,20          | (25.642.901.436)           | 81,68        |
| 6.2.04.       | Pemberian Pinjaman Daerah                         | 2.500.000.000,00            | 2.500.000.000,00            | 0                          | 100,00       |
|               | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                           | <b>999.055.448.634,00</b>   | <b>258.865.991.150,79</b>   | <b>(740.189.457.483)</b>   | <b>25,91</b> |
|               | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>     | <b>-</b>                    | <b>62.544.957.626,61</b>    | <b>62.544.957.627</b>      | <b>-</b>     |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Provinsi NTT tahun 2021